Kamis, 1 Juli 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekda Kabupaten Jepara



Penjelasan:

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mencatut nama dan foto profil dari Sekda Jepara, Edy Sujatmiko.

Dilansir dari instagram resmi Pemerintah Kabupaten Jepara @jeparakabgoid, Diskominfo Jepara mengonfirmasi bahwa akun Whatsapp tersebut bukan milik Sekda Jepara. Edy Sujatmiko berpesan kepada siapapun yang dihubungi akun dengan foto dan nomor tersebut dan meminta sesuatu, agar diabaikan saja.

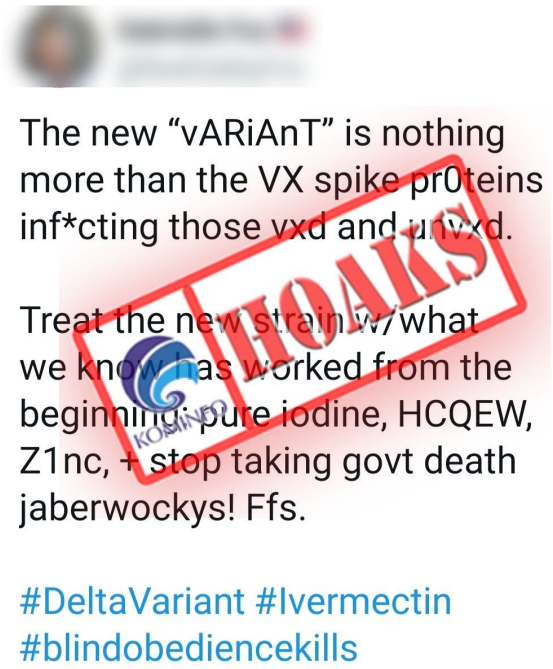
Hoaks

Link Counter :

- https://mobile.twitter.com/jeparakabgoid/status/1410145324404908038

Kamis, 1 Juli 2021

2. [HOAKS] Corona Varian Delta Disebabkan oleh Vaksin Covid-19



Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa kemunculan varian Covid-19 baru jenis Delta yang disebabkan oleh vaksin Covid-19, bukan karena virus. Dalam postingannya juga disebutkan, masyarakat tidak perlu melakukan vaksin karena dianggap berbahaya dan dapat menularkan virus Corona Varian Delta serta penyakit lainnya kepada orang yang tidak divaksinasi.

Dilansir dari Kumparan.com, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Faktanya vaksin Covid-19 tidak mengandung virus hidup, justru vaksin diberikan untuk membentuk antibodi atau kekebalan terhadap virus, termasuk terhadap varian Delta. Hal ini juga disampaikan oleh Spesialis penyakit menular dan peneliti vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland, Amerika Serikat, Dr Matthew Laurens mengatakan, bahwa tidak ada vaksin Covid-19 dengan izin penggunaan darurat di mana pun mengandung virus SARS-CoV-2 yang hidup dan dapat menulari orang lain, penularan terjadi karena virus corona masuk ke dalam tubuh seseorang lewat tetesan atau *droplet*.

Hoaks

Link Counter :

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-corona-varian-delta-disebabkan-oleh-vaksin-covid-19-1w2iscfOf09/full

Kamis, 1 Juli 2021

3. [HOAKS] Aktivasi MySAPK Paling Lambat Akhir Bulan Juni 2021



Penjelasan:

Beredar informasi melalui *Broadcast* WhatsApp yang berisi pengumuman kepada seluruh ASN untuk mengaktivasi akun MySAPK paling lambat akhir bulan Juni 2021. Dalam pesan itu juga disebutkan, apabila tidak melakukan aktivasi akun MySAPK, maka layanan kepegawaian yang bersangkutan seperti kenaikan pangkat dan pensiun akan diputus oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Faktanya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta melalui laman Instagramnya @bkddkijakarta menegaskan bahwa informasi mengenai aktivasi akun MySAPK paling lambat akhir bulan Juni 2021 adalah tidak benar atau hoaks. Adapun informasi dan pemberitahuan resmi mengenai "aktivasi MySAPK" dan Pemutakhiran Data Mandiri ASN akan disampaikan melalui website bkddki.jakarta.go.id dan media Instagram @bkddkijakarta. Pihaknya mengimbau kepada ASN Pemprov DKI Jakarta agar tidak risau dan menunggu informasi resmi dari BKN dan BKD Pemprov DKI Jakarta.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CQuh3SipY7x/
- https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/SIARAN-PERS-Nomor_-015_RILIS_BKN_V_2021-Jakarta-24-Mei-2021-Mulai-Juli-2021-ASN-dan-PPT-Non-ASN-Wajib-Lakukan-Pemutakhiran-Data-Mandiri-Lewat-MySAPK.pd

Kamis, 1 Juli 2021

4. [DISINFORMASI] Penaburan Racun di Wilayah Madura Menggunakan Pesawat Terbang



Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp berupa video dan gambar yang menampilkan beberapa orang di dalam pesawat terbang sedang menaburkan bubuk putih, pada keterangan pesan tersebut terdapat narasi yang mengklaim bahwa pesawat terbang itu sedang menaburkan racun di wilayah Madura, Jawa Timur.

Faktanya, klaim pada pesan berantai yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut menaburkan racun di wilayah Madura adalah keliru. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa video dan foto tersebut merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan penyemaian awan menggunakan teknologi modifikasi cuaca dengan cara menaburkan serbuk garam pada ketinggian 20.000 kaki diatas permukaan tanah yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, BPPT dan BNPB. Diketahui bahwa lokasi penaburan garam tersebut berada di wilayah JABODETABEK dan Sumatera Selatan.

Disinformasi

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/06/30/salah-racun-di-sebarkan-pesawat-untuk-area-madura/
- https://video.okezone.com/play/2021/02/24/1/129427/tni-modifikasi-cuaca-jabodetabek
- https://wartakita.id/salah-racun-di-sebarkan-pesawat-untuk-area-madura/

Kamis, 1 Juli 2021

5. [DISINFORMASI] Pemerintah Pinjam Rp 13 Triliun dari Bank Dunia untuk Lockdown



Penjelasan:

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan pemerintah meminjam Rp 13 Triliun dari Bank Dunia untuk penerapan penguncian wilayah (lockdown).

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim utang Rp 13 triliun dari Bank Dunia untuk penerapan lockdown adalah keliru. Faktanya, pinjaman tersebut digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Dilansir kompas.com, Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman baru sebesar 500 juta dollar AS yang diajukan Pemerintah Indonesia. Utang baru dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Beberapa di antaranya yakni penambahan tempat isolasi pasien virus corona (Covid-19), tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga medis, lab pengujian, serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Gbmo6E9K-cek-fakta-pemerintah-pinjam-rp13-triliun-dari-bank-dunia-untuk-lockdown-ini-faktanya

Kamis, 1 Juli 2021

6. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Hanya untuk Orang yang Tidak Punya Penyakit



Penjelasan:
Beredar di aplikasi Tiktok sebuah video yang menyebut vaksin Covid-19 tidak efektif bagi orang yang punya penyakit. Video berdurasi dua menit 27 detik itu menampilkan seseorang bernama Ustadz Prof. DR. dr Yuwono M.Biomed. yang menyampaikan beberapa klaim. Pada detik ke-35, ia menyebut bahwa orang yang memiliki vaksin tidak usah di vaksin Covid-19 dan vaksin tidak akan bekerja baik dalam tubuh orang yang punya penyakit. Selain itu, ia menyebutkan untuk mencapai herd immunity hanya butuh 40-60 persen orang yang divaksin dan mengklaim beberapa orang yang sudah divaksin dilaporkan masuk ICU.

Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat edaran nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas Covid-19, serta Sasaran Tunda yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut tercantum salah satunya pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok komorbid dengan ketentuan yang harus dipenuhi. Bagi kelompok Lansia, pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28). Sementara untuk kelompok Komorbid, dalam hal ini Hipertensi, dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 MmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining. Bagi kelompok komorbid dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Bagi kelompok komorbid penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksin. Selain itu penyintas Covid-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Begitupun ibu menyusui dapat juga diberikan vaksinasi. Dilansir lebih lanjut dari penjelasan Kementerian Kesehatan, sebagaimana dikutip oleh cnbcindonesia.com, vaksin Covid-19 dapat disuntikkan dalam keadaan tertentu kepada warga yang menderita diabetes melitus, penyakit paru seperti Asma, TBC, dan menderita HIV. Lebih lanjut, penderita hipertensi yang tekanan darahnya tidak di atas 180/110MmHg, penderita diabetes yang belum memiliki komplikasi akut, penyintas kanker, serta penyintas Covid-19 yang telah sembuh minimal 3 bulan dapat diberikan vaksinasi Covid-19. Mereka yang dalam pengobatan TBC dua minggu lebih bisa disuntikkan vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19 bisa diberikan kepada mereka yang mengidap penyakit autoimun sistemik, diabetes melitus yang minum obat teratur, penderita penyakit HIV dan memiliki riwayat penyakit epilepsi jika dalam keadaan terkontrol.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210215120851-37-223351/daftar-lengkap-mereka-yang-boleh-tak-boleh-divaksin-covid
- https://www.kemkes.go.id/article/view/21021800001/kelompok-komorbid-bisa-divaksinasi-begini-ketentuannya.html
- https://www.instagram.com/p/CNzpRBEMGAL/?utm_medium=copy_link
- https://www.instagram.com/p/CKiOrx7s5Rn/?utm_medium=share_sheet
- https://www.instagram.com/p/CLMcGMBsxIb/?utm_medium=share_sheet
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4594979/cek-fakta-tidak-benar-vaksin-covid-19-hanya-untuk-orang-yang-tidak-punya-penyakit

Kamis, 1 Juli 2021

7. [DISINFORMASI] Insentif Nakes dari Pusat Dihentikan



Penjelasan:

Beredar sebuah kabar yang menyebut jika pemberian insentif untuk tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 dihentikan oleh Pemerintah Pusat.

Dilansir dari merdeka.com, berdasarkan hasil penelusuran, Kementerian Kesehatan melalui situsnya menegaskan insentif bagi tenaga kesehatan adalah hak mereka yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, karena itu tidak ada penghentian pembayaran insentif baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa anggaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 alokasi anggaran insentif bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-ada-penghentian-pembayaran-insentif-nakes.html